



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Jl. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi
Telp. (0713) 390003 Kode pos 31211

RENCANA KERJA TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi arah yang lebih konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan demi menjamin konsistensi, komitmen dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 ini bermanfaat dan dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Talang Ubi,

2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19611124 198903 1 004



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	10
3.3 Program dan Kegiatan	11
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	12
BAB V : PENUTUP	
5.1 Pencatatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	13
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	14
5.3 Rencana Tindak Lanjut	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2020 memuat kerangka ekonomi makro, sasaran dan target pengembangan wilayah, integritas pendanaan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan, sasaran, indikator, dan target prioritas pembangunan nasional dan sasaran, indikator, target, dan arah pembangunan bidang, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 disusun sebagai acuan bagi seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Sekretariat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang program/kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2020.

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Sesuai Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melaksanakan 15 (lima belas) Program, 68 (enam puluh delapan) Kegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki dana yang bersumber dari APBD Tahun 2019 dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 70.935.252.154,- Terealisasi sebesar Rp. 62.294.357088,- atau 87,82 % dengan Sisa Anggaran sebesar Rp. 8.640.895.066,-. Adapun rekap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019 perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir s/d tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 Lampiran Dokumen Renja ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-

program utama Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa di review seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan Organisasi dapat dicapai secara maksimal. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat dilihat pada tabel 2 Lampiran Dokumen Renja ini.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebelum diadakan analisis terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu disampaikan terlebih dahulu upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sarana prasarana maka dipandang perlu penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dan/ atau dapat dilakukan peningkatan kualitas sumber daya melalui bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan dalam menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Disamping itu perlu penambahan kuantitas peralatan sarana dan prasarana kantor.

Faktor eksternal yang mendatangkan manfaat atau keuntungan besar di kemudian hari dikategorikan sebagai peluang (*Opportunities*). Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, malah mungkin menghalangi dalam mencapai sasaran atau tujuan dikategorikan sebagai ancaman (*Threats*). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Tantangan/Ancaman adalah suatu kondisi yang ada dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan. Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan atau diharapkan disebut analisis SWOT. Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Tantangan /Ancaman (*Threats*) sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
2. Kemajuan globalisasi semakin berpengaruh terhadap pembangunan daerah;

Berdasarkan analisis faktor – faktor Eksternal dan faktor – faktor Internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) , maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagi berikut :

1. Strategi SO (mendayagunakan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang)
2. Strategi ST (mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
3. Strategi WO (mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
4. Strategi WT (meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman)

Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Peluang (*Opportunities*) sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan informasi dan publikasi Produk Hukum;
2. Meningkatnya kesadaran dan budaya hukum bagi masyarakat;
3. Meningkatkan Kepatuhan hukum masyarakat;
4. Terbitnya dokumen produk hukum daerah;
5. Terciptannya lingkungan masyarakat yang tertib dan aman; dan
6. Meningkatnya administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional dan akuntabel.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 tentu harus berpedoman pada RKPD yang telah disahkan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan bagi Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan kabupaten Penukal Abab Lematang ilir tahun 2020. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat forum Perangkat Daerah sehingga terjadi perbedaan rincian dengan rancangan awal RKPD. Dalam proses hasil penyusunan kebutuhan program/kegiatan terdapat 10 Kegiatan baru di luar RKPD untuk menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan. Adapun hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 3 Lampiran Dokumen Renja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/Kegiatan yang ditunjukkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hal ini berarti, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 murni berisi Program/Kegiatan yang sudah direncanakan sesuai renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang di rencanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan program strategis dalam Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 ini disamping berpedomen pada program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir Tahun 2016-2021, juga memperhatikan berbagai program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun. Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

a. Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah ini disusun sebagai turunan/penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016–2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016–2021, dan nantinya dituangkan kembali dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahun berkenaan untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, Dokumen Rencana Kerja ini memiliki tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sasaran

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai penentuan target-target kinerja yang harus dicapai dalam tahun anggaran berjalan/ berkenaan. Agar dalam pelaksanaan program kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat dijalankan dengan optimal sebagai salah satu langkah pemenuhan target jangka menengah yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah sebagai langkah pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Target RPJMD Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah terdapat beberapa perbedaan pagu indikatif yang dibutuhkan baik yang melebihi maupun lebih kecil dari pagu indikatif yang telah tertuang dalam RKPD. Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table 5 Lampiran Dokumen Renja ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, rencana kerja dan pendanaan pada Sekretariat Daerah mengacu pada dokumen renstra serta kebijakan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pada Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir dalam rangka pembangunan daerah secara profesional dan akuntabel adapun rincian lengkap Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal abab Lemtang Ilir tahun Anggaran 2020 Prakiraan maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5 Lampiran Dokumen Renja ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Pencatatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi maka kegiatan dan saran yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
3. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-2021. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi Pemerintah, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.
2. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang laporannya diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan .
3. Pada akhir tahun anggaran tahun 2020 Sekretaris Daerah melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2020 dan memperbaiki pencapaian target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlampir.

Talang Ubi,

2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19611124 198903 1 004

Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju 2021

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN SKPD : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2020	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2021		
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	10	11	4	5	6
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				15,028,475,000					16,531,322,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan untuk administrasi surat menyurat	Kab. PALI	4500 Lembar	27,000,000	APBD		Kab. PALI	4500 Lembar	29,700,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar meliputi air, listrik, tv kabel, dan internet	Kab. PALI	45 Rekening	1,530,000,000	APBD		Kab. PALI	45 Rekening	1,683,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Unit kendaraan dinas yang diasuransikan	Kab. PALI	84 Unit	400,000,000	APBD		Kab. PALI	84 Unit	440,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah operator administrasi keuangan	Kab. PALI	315 OB	254,700,000	APBD		Kab. PALI	29 Orang	280,170,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Milik Daerah	Jumlah Unit kendaraan dinas yang dibayar pajak	Kab. PALI	84 Unit	100,000,000	APBD		Kab. PALI	84 Unit	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan	Kab. PALI	60 Jenis	225,000,000	APBD		Kab. PALI	60 Jenis	247,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. PALI	10 Jenis	256,775,000	APBD		Kab. PALI	10 Jenis	282,452,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. PALI	25 Jenis	100,000,000	APBD		Kab. PALI	25 Jenis	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. PALI	15 Jenis	250,000,000	APBD		Kab. PALI	15 Jenis	275,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga / kantor	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga/kantor	Kab. PALI	15 Jenis	100,000,000	APBD		Kab. PALI	17 Jenis	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Kab. PALI	5 Jenis Bacaan	100,000,000			Kab. PALI	5 Jenis Bacaan	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu yang mengikuti acara	Kab. PALI	36810 Orang	3,681,000,000	APBD		Kab. PALI	30.681 Orang	4,049,100,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah	Kab. PALI	1000 Laporan	2,600,000,000	APBD		Kab. PALI	1080 Laporan	2,860,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	Kab. PALI	200 Laporan	100,000,000	APBD		Kab. PALI	300 Laporan	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknik Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung administrasi/ Teknik Perkantoran	Kab. PALI	266 ORG	5,304,000,000	APBD		Kab. PALI	266 ORG	5,834,400,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				9,181,000,000					10,099,100,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kab. PALI	17 Jenis	500,000,000	APBD		Kab. PALI	10 Jenis	550,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 11	Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen pengadaan tanah	Kab. PALI	2 Persil	5,416,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Persil	5,957,600,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Unit Rumah Jabatan yang terpelihara	Kab. PALI	3 Unit	180,000,000	APBD		Kab. PALI	3 Unit	198,000,000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Kab. PALI	1 Unit	180,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Unit	198,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Kab. PALI	15 Jenis	180,000,000	APBD	Kab. PALI	15 Jenis	198,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Kab. PALI	84 Unit	2,520,000,000	APBD	Kab. PALI	84 Unit	2,772,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 45	Pengadaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang disewa	Kab. PALI	1 Unit	80,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Unit	88,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 46	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang disewa	Kab. PALI	1 Unit	125,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Unit	137,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Program Peningkatan Displin Aparatur				1,061,000,000				1,167,100,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 07	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	Kab. PALI	1 Kegiatan	1,061,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Kegiatan	1,167,100,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				55,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 11	Bimbingan teknis/ Training of Trainer	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/training of trainer	Luar Daerah Kab. PALI	10 Aparatur	50,000,000	APBD	Luar Daerah Kab. PALI	10 Aparatur	55,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				380,000,000				418,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. PALI	1 Laporan	5,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	5,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang tersusun	Kab. PALI	2 Dokumen	5,000,000	APBD	Kab. PALI	2 Dokumen	5,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang tersusun	Kab. PALI	4 Dokumen	5,000,000	APBD	Kab. PALI	4 Dokumen	5,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 06	Penyusunan pelaporan keuangan dan pelaporan barang	Jumlah laporan keuangan dan barang yang tersusun	Kab. PALI	2 laporan	5,000,000	APBD	Kab. PALI	2 laporan	5,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 08	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	200,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	220,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 09	Investarisasi aset / barang inventaris SKPD	Jumlah dokumen inventarisasi aset atau barang inventaris SKPD	Kab. PALI	1 Dokumen	5,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	5,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Kab. PALI	1 Dokumen	5,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	5,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 12	Penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	Jumlah dokumen LKJIP KABUPATEN	Kab. PALI	1 Dokumen	150,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	165,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan				103,000,000				113,300,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 05	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Laporan Rapat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang tersusun	Kab. PALI	1 Paket	103,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	113,300,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				1,680,000,000				1,848,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 04	Penanganan Kasus Pada wilayah Pemerintahan Kabupaten PALI	Jumlah Lembaga yang Bekerja Sama	Kab. PALI	1 Lembaga	320,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Lembaga	352,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 12	Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pembuatan Laporan Kegiatan APBD	Jumlah Laporan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pembuatan Laporan Kegiatan APBD yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	102,500,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	112,750,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 28	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kab. PALI	1 Unit	1,032,500,000	APBD	Kab. PALI	1 Unit	1,135,750,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 29	Evaluasi Kelembagaan SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kelembagaan SKPD yang tersusun	Kab. PALI	1 Laporan	55,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	60,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 43	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	100,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 44	Monitoring Evaluasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan masyarakat	Kab. PALI	1 Laporan	70,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	77,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah				8,993,000,000				9,892,300,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 08	Publikasi , Pemberitaan dan Pendapat Umum	Jumlah Media Publikasi, Pemberitaan dan Pendapat Umum yang tersedia	Kab. PALI	120 Media	4,500,000,000	APBD	Kab. PALI	120 Media	4,950,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 06	Kerja sama Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Kerja sama pemerintah daerah Kabupaten PALI dengan Pemerintah Daerah Lainnya dalam wadah APKASI	Luar Daerah dan Dalam Daerah Kab. PALI	1 Kegiatan	223,000,000	APBD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Kab. PALI	1 Kegiatan	245,300,000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 09	Fasilitasi Kegiatan KDH dan WKDH	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH Luar daerah dan dalam daerah	Kab. PALI	1 Kegiatan	4,070,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Kegiatan	4,477,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 12	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah Stel Pakaian Dinas KDH/WKDH	Kab. PALI	20 Stel	200,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Kegiatan	220,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Program Pembangunan Bidang Ekonomi				317,500,000				349,250,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 01	Pengumpulan Penyusunan Data dan Informasi untuk Dokumen Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Informasi Kebijakan Perekonomian yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	72,500,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	79,750,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 04	Koordinasi Monitoring, Evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring, Evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Bersubsidi yang tersusun	Kab. PALI	1 Laporan	70,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	77,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 02	Partisipasi Pameran/ Expo	Jumlah kegiatan Pameran/expo	Kab. PALI	1 Kegiatan	95,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Kegiatan	104,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 03	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	80,000,000	APBD	Kab. PALI	4 Laporan	88,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				234,428,000				257,870,800
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 03	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah Laporan percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah yang tersusun	Kab. PALI	1 Laporan	81,900,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	90,090,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 12	Pembakuan Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	152,528,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	167,780,800
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				1,542,000,000				1,696,200,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 10	Penyusunan Standar Operating Procedure Unit	Jumlah Dokumen Standar Operating Procedure Unit yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	55,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	60,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 12	Sosialisasi analisis beban kerja	Jumlah Dokumen ABK Dan ANJAB	Kab. PALI	2 Dokumen	97,000,000	APBD	Kab. PALI	2 Dokumen	106,700,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 18	Pendampingan dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen Pendampingan dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kab. PALI	1 Dokumen	100,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 19	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Sistem/Jaringan Dokumen tasi dan Informasi Hukum	Kab. PALI	1 Sistem/Jaringan	80,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Sistem/Jaringan	88,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 20	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang tersusun	Kab. PALI	5 Laporan	400,000,000	APBD	Kab. PALI	5 Laporan	440,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 21	Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah PERDA dan PERBUP Tertcipta sebagai Produk Hukum Daerah	Kab. PALI	8 PERDA/ 60 PERBUP	810,000,000	APBD	Kab. PALI	8 PERDA/ 60 PERBUP	891,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				110,150,000				121,165,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 20	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Tersusun	Kab. PALI	1 Laporan	50,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	55,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 27	Implementasi Rencana Aksi HAM	Jumlah Peserta Peduli HAM	Kab. PALI	200 Peserta	60,150,000	APBD	Kab. PALI	1 Laporan	66,165,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi				310,000,000				341,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 11	Penyusunan daftar standar harga satuan barang dan upah	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang dan Upah yang tersusun	Kab. PALI	1 Buku	180,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Buku	198,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 35	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang tersusun	Kab. PALI	1 Dokumen	130,000,000	APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	143,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Program Pembangunan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan & Lembaga Pendidikan Keagamaan				8,300,055,779				9,130,061,357
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 03	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah Kegiatan MTQ/ STQ	Kabupaten dan Provinsi	1 Kegiatan	450,000,000	APBD	Kabupaten dan Provinsi	1 Kegiatan	495,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 04	Penyelenggaraan safari ramadhan	Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan	Kabupaten PALI	1 Kegiatan	500,000,000	APBD	Kabupaten PALI	1 Kegiatan	550,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 10	Pembinaan mental spiritual keagamaan	Jumlah Imam,Mudim,ustadz dan Ustadzah pembinaan mental spiritual keagamaan	Kab. PALI	1250 Orang	3,850,000,000	APBD	Kab. PALI	1250 Orang	4,235,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 08	Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah Peserta Ibadah Umroh dan Haji	Kab. PALI	108 Umroh/TPHD	3,500,055,779	APBD	Kab. PALI	108 Umroh/TPHD	3,850,061,357

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				252,000,000				277,200,000	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yang terlaksana	Kab. PALI	1 Kegiatan	252,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Kegiatan	277,200,000
					47,542,608,779					50,852,569,657

Talang Ubi,

2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ,

SYAHRON NAZIL
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19611124 198903 1 004